



Analisis Kinerja Keuangan Pemerintah Kota Bandung Ditinjau Dari Rasio Efektivitas, Rasio Efisiensi dan Rasio Kemandirian Daerah

Falaha Hasanatul Ummah¹, Meilani Purwanti²

¹²Universitas Teknologi Digital, Bandung, Indonesia

Alamat: Jl.Cibogo No.Indah 3, Mekarjaya, Kec. Rancasari, Kota Bandung,
Jawa Barat 40000, Indonesia

Korespondensi penulis: falaha10221131@digitechuniversity.ac.id

Abstract

The purpose of this research is to shed light on the Bandung City Government's fiscal performance by analysing three key indicators: the Regional Independence Ratio, the Effectiveness Ratio, and the Efficiency Ratio. In this research, the three ratios were used to implement a qualitative methodology. According to the study's findings, the Bandung City Government has effective financial management and produces good financial outcomes generally. With an effectiveness ratio in the effective range for the years 2020–2023, the Bandung City Government should have no trouble reaching its (PAD) goal. It is necessary to reorganise the regional expenditure structure since, at the same time, the local government is deemed less efficient. The City of Bandung has moderate fiscal independence, according to the independence ratio, which indicates that the local government is beginning to have greater autonomy in managing the budget and development finance.

Keywords: *Effectiveness Ratio; Efficiency Ratio; Regional Independence Ratio; Budget Realization Report*

Abstrak

Kesehatan fiskal Pemerintah Kota Bandung menjadi fokus analisis ini, yang akan menggunakan Rasio Efektivitas, Rasio Efisiensi, dan Rasio Kemandirian Daerah sebagai indikator utama. Dalam penelitian ini, ketiga rasio tersebut digunakan untuk menerapkan metodologi kualitatif. Secara keseluruhan, kinerja keuangan Pemerintah Kota Bandung dinilai sangat baik berdasarkan temuan penelitian. Guna periodisasi 2020–2023, Pemerintah Kota Bandung memiliki rasio efektivitas yang efektif, artinya mereka berhasil mencapai target (PAD). Namun, pada saat yang sama, pemerintah daerah kurang efisien, yang menuntut reorganisasi anggaran kota. Di sisi lain, rasio otonomi fiskal Kota Bandung berada dalam kategori moderat, menggambarkan pemerintah kota mulai mengeksplorasi kemandirian dalam mengelola anggaran serta mendanai pembangunan

Kata Kunci: Rasio Efektivitas; Rasio Efisiensi; Rasio Kemandirian Daerah; Laporan Realisasi Anggaran

1. LATAR BELAKANG

Bagian penting dari sistem federal Indonesia adalah otonomi daerah, yang mendelegasikan kewenangan kepada provinsi dan pemerintah daerah untuk melaksanakan tugas-tugas bantuan, mengendalikan, dan mengelola urusan pemerintahan secara mandiri (Putro et al., 2024). Pengelolaan keuangan daerah yang bertanggung jawab merupakan unsur penting dalam pelaksanaan otonomi daerah. Tujuan utama dari pengelolaan ini adalah menjamin bahwa dana pemerintah daerah digunakan secara akuntabel, transparan, dan efisien untuk pelayanan publik dan pembangunan. Salah satu aspek krusial dalam mengevaluasi efisiensi administrasi kota adalah melalui penghitungan rasio yang mencerminkan kemampuan keuangan daerah.

Sistem pengendalian manajemen di sektor publik dan swasta sangat bergantung pada pengukuran kinerja. Organisasi dan manajernya dituntut pertanggungjawaban atas layanan publik yang mereka berikan dalam penilaian kinerja ini. Penilaian ini mempertimbangkan baik jumlah total dana publik yang digunakan maupun sejauh mana dana tersebut digunakan secara efektif dan efisien (Awani & Hariani, 2021).

Rasio keuangan yang diperoleh dari sistem pelaporan akuntabilitas keuangan pemerintah daerah digunakan untuk mengevaluasi kinerja keuangan pemerintah daerah. Analisis ini menggunakan rasio kemandirian keuangan regional, rasio efektivitas, dan rasio efisiensi sebagai metrik keuangan. Ketiga rasio ini menunjukkan kemampuan suatu daerah dalam merealisasikan pendapatan, mengelola pengeluaran, dan membiayai kegiatan pemerintah.

2. KAJIAN TEORITIS

Kinerja Keuangan

Kinerja keuangan Pemda merupakan cerminan dari kompetensi wilayah dalam manajerial aset sumber finansial yang berasal atas PAD guna pemenuhan berbagai kebutuhan wilayah terkait. Penilaian ini mencakup pelaksanaan pendapatan dan belanja yang disusun berdasarkan pendekatan akrual, sehingga dapat memberikan gambaran mengenai sejauh mana keberhasilan pengelolaan keuangan daerah. Evaluasi kinerja keuangan dilakukan melalui sejumlah indikator, seperti rasio efektivitas, efisiensi, dan kemandirian fiskal. Pengukuran dilakukan dalam periode anggaran terkhusus menyandingkan target anggaran direncanakan beserta realisasi tercapai (Irnawati, 2023)

Evaluasi kinerja keuangan bertujuan untuk menilai sejauh mana sebuah institusi, lembaga, atau organisasi bertanggung jawab secara finansial dalam memberikan layanan publik yang optimal, dengan menggunakan indikator-indikator keuangan sebagai alat ukurnya. Bentuk akuntabilitas ini mencakup kewajiban untuk memberikan laporan yang transparan dan akurat kepada masyarakat mengenai penggunaan dana, termasuk memastikan bahwa dana tersebut telah dikelola dan dibelanjakan secara hemat, tepat guna, dan efisien (Dian Anita & Octavianidori, 2024)

Laporan Realisasi Anggaran

LRA ialah pelaporan finansial disusun oleh pemerintah daerah sebagai bentuk pertanggungjawaban. LRA bertujuan untuk menggambarkan kondisi keuangan pemerintah, menawarkan skor prediktis kadi acuan rencana pengembangan kebijakan finansial sbeserta *feedback* guna evaluasi manajerial. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010, LRA memuat unsur-unsur penting seperti pendapatan, pengeluaran, transfer, dan pembiayaan yang menjadi satu kesatuan dalam penyusunan laporan pelaksanaan anggaran. (Amanda et al., 2021)

Rasio Efektifitas

Rasio Efektivitas pada Penilaian Kinerja Keuangan Daerah ialah Rasio pelaksanaan anggaran merupakan indikator kunci untuk menilai sejauh mana pemerintah daerah mencapai target dan tujuan yang ditetapkan pada APBD. Rasio ini mengevaluasi kelayakan pelaksanaan program atau kegiatan yang direncanakan dalam anggaran yang dialokasikan, serta apakah hasilnya sesuai beserta visi sudah ditetapkan (Hidaya & Hasbiullah, 2023)

Rasio Efisiensi

Rasio Efisiensi ialah tolak ukur penting, dimanfaatkan guna menilai sampai dimana Pemda mampu manajerial aset finansialnya dengan efektif dan hemat. Rasio ini secara langsung mencerminkan hubungan antara realisasi belanja yang dilakukan dengan pendapatan yang berhasil diperoleh oleh pemerintah daerah selama periode tertentu. Dengan kata lain, rasio ini memberikan informasi tentang seberapa baik pemerintah daerah dapat menggunakan dana yang dimilikinya untuk mendanai belanja tanpa melebihi kapasitas pendapatan yang tersedia. (Divianto, 2017)

Rasio Kemandirian Daerah

Kemandirian keuangan daerah berarti pemerintah daerah dapat membiayai operasional, infrastruktur, dan layanan publiknya sendiri tanpa bergantung pada sumber pendanaan pusat seperti hibah dari pemerintah negara bagian atau federal. Salah satu indikator kemandirian fiskal adalah proporsi dana lokal yang berasal dari sumber selain pinjaman atau transfer dari pemerintah federal atau provinsi atau dari pemerintah daerah lain. Proporsi ini diungkapkan sebagai persentase dari total pendapatan lokal. Karenannya, rasio kemandirian menunjukkan seberapa banyak dana yang diterima suatu wilayah dari pemerintah federal atau provinsi. (Yusri, 2019)

PENELITIAN TERDAHULU

Penelitian terdahulu yang dilakukan (Heriyanto, 2024) dalam penelitiannya yang berjudul “Analisis Kinerja Keuangan Pengelolaan Alokasi Dana Desa Berdasarkan Rasio Efektivitas Dan Rasio Efisiensi Pada Desa Tegalluar Kecamatan Bojongsoang Kabupaten Bandung”. Jenis penelitian ini merupakan deskriptif, dengan menggunakan metode pendekatan kualitatif. Dengan hasil penelitian pada tahun 2022, rasio efektivitas sebesar 100,4% yang termasuk dalam kategori sangat efektif. Pada tahun 2023, rasio efektivitas sebesar 100%, juga termasuk dalam kategori sangat efektif. Ini menunjukkan bahwa pemerintah Desa Tegalluar mampu merealisasikan anggaran sesuai target dengan baik dan kegiatan yang diprogramkan telah berjalan sesuai harapan. Pada tahun 2022, rasio efisiensi sebesar 100,7%, yang berarti termasuk dalam kategori tidak efisien karena pengeluaran lebih besar daripada penerimaan. Pada tahun 2023, rasio efisiensi sebesar 100%, yang berarti termasuk dalam kategori kurang efisien karena pengeluaran sama dengan penerimaan tanpa adanya surplus atau efisiensi pengelolaan. Ini menunjukkan bahwa pengelolaan dana desa masih perlu ditingkatkan untuk mengurangi biaya pengeluaran agar lebih efisien.

Penelitian terdahulu yang dilakukan oleh (Yusri, 2019) dalam penelitiannya yang berjudul “Analisa Rasio Efektivitas, Rasio Efisiensi dan Rasio Kemandirian Keuangan Daerah Terhadap Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah (APBD)”. Jenis penelitian ini merupakan deskriptif, dengan menggunakan metode pendekatan kualitatif. Hasil penelitian ini, Rasio Efektivitas Pemerintah Kota Banda Aceh Tahun Anggaran 2014 sampai 2018 dikategorikan efektif karena persentase di atas 100%, yakni sebesar 101,58%. Efisiensi Kinerja Keuangan Pemerintah Kota

Banda Aceh Tahun Anggaran 2014 sampai 2018 dikategorikan kurang efisien karena persentase rasio efisiensi di bawah seratus. Kemandirian pengelolaan keuangan Pemerintah Kota Banda Aceh Tahun Anggaran 2014 sampai 2018 dikategorikan masih rendah, dengan tingkat rata-rata 25,19%. Pemerintah Kota Banda Aceh masih memiliki tingkat ketergantungan yang tinggi terhadap Bantuan Pemerintah Provinsi/Pusat.

3. METODE PENELITIAN

Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif. Metode penelitian kualitatif menurut Sugiyono adalah metode yang berlandaskan pada filsafat postpositivisme dan digunakan untuk meneliti objek dalam kondisi alamiah, di mana peneliti berperan sebagai instrumen kunci. Dalam pelaksanaannya, teknik pengumpulan data dilakukan secara triangulasi, yaitu menggunakan berbagai metode seperti wawancara, observasi, dan dokumentasi untuk memperoleh data yang mendalam dan menyeluruh. Analisis data bersifat induktif, artinya dimulai dari data yang diperoleh di lapangan untuk kemudian dirumuskan pola atau teori. Hasil dari penelitian kualitatif lebih menekankan pada makna yang terkandung di balik fenomena yang diteliti daripada sekadar menghasilkan generalisasi. Oleh karena itu, metode ini cocok digunakan untuk memahami realitas sosial yang kompleks dan dinamis (Sugiyono, 2022).

Objek Penelitian

Objek penelitian adalah kondisi atau keadaan yang memberikan penjelasan mengenai situasi tertentu yang menjadi fokus kajian, dengan tujuan memperoleh pemahaman yang lebih mendalam terhadap penelitian yang dilakukan (Agil et al., 2023). Menurut Supriati (2012: 38) menyatakan bahwa objek penelitian merupakan variabel yang menjadi fokus pengamatan oleh peneliti di lokasi tempat penelitian berlangsung.

Objek yang diteliti pada penelitian ini adalah Kota Bandung yang dimana akan dijelaskan tentang analisis kinerja keuangan ditinjau dari rasio efektivitas, rasio efisiensi dan rasio kemandirian daerah yang dilihat dari laporan realisasi anggarannya.

Teknik Pengumpulan Data

Strategi yang digunakan peneliti untuk mengumpulkan data disebut dengan metode pengumpulan data. Tujuan dari ini adalah untuk mengumpulkan data yang diperlukan untuk memenuhi tujuan penelitian. Kurangnya pengetahuan tentang metode pengumpulan data akan

memungkinkan menghalangi peneliti untuk mendapatkan data yang memenuhi persyaratan yang relevan (Heriyanto, 2024)

Teknik pengumpulan data yang dilakukan oleh peneliti dalam penelitian ini adalah dokumentasi. Dokumentasi adalah suatu pendekatan pengumpulan data dimana data diperoleh dengan cara membaca, menelaah, dan melihat dokumen-dokumen terkait yang berkaitan dengan objek penelitian (Safrudin et al., 2023). Pendekatan dokumentasi yang dilakukan pada penelitian ini untuk mengumpulkan data mengenai anggaran Kota Bandung Tahun Anggaran 2020-2023.

Metode Analisis Data

Rasio Efektivitas

Rumus perhitungan rasio efektivitas pengelolaan keuangan Pemda memanfaatkan penyandingan realisasi penerimaan beserta target serta dikalikan 100%.

$$\text{Rasio Efektivitas} = \frac{\text{Realisasi Penerimaan}}{\text{Target Penerimaan}} \times 100\%$$

Berdasarkan kriteria penilaian yang ditetapkan Permendagri No 690.900.327 Tahun 1996 terkait Pedoman Penilaian Keuangan dan Kinerja, tingkat efektivitas pengelolaan keuangan daerah dapat ditentukan dengan mengetahui perbandingan antara target pendapatan serta pendapatan aktual daerah:.

Tabel 1. Kriteria Rasio Efektifitas

Persentase	Kriteria
> 100%	Sangat Efektif
90% - 99%	Efektif
80% - 90%	Cukup Efektif
60% - 80%	Kurang Efektif
< 60%	Tidak Efektif

Sumber : Tim Litbang Depdagri Fisipol UGM
(Yusri; Hasrina, 2019)

Rasio Efisiensi

Dengan menyandingkan pengeluaran aktual beserta pendapatan/penerimaan aktual, kemudian dikalikan 100%, bisa didapat rasio efisiensi pengelolaan keuangan Pemda..

$$\text{Rasio Efisiensi} = \frac{\text{Realisasi Belanja}}{\text{Realisasi Penerimaan}} \times 100\%$$

Standar evaluasi yang dikembangkan selaras beserta Permen No No. 690.900.327 Tahun 1996, menetapkan standar evaluasi keuangan dan kinerja, bisa dimanfaatkan guna menentukan sejauh mana pengelolaan keuangan daerah efisien.

Tabel 2. Kriteria Rasio Efisiensi

Persentase	Kriteria
> 100%	Tidak Efisien
90% - 100%	Kurang Efisien
80% - 90%	Cukup Efektif
60% - 80%	Efisien
< 60%	Sangat Efisien

Sumber : Tim Litbang Depdagri Fisipol UGM
(Yusri; Hasrina, 2019)

Rasio Kemandirian Daerah

Rumus menghitung rasio kemandirian keuangan daerah memanfaatkan penyandingan PAD beserta bantuan lembaga pusat, provinsi dan pinjaman kemudian dikali 100%.

$$RKD = \frac{\text{Pendapatan Asli Daerah}}{\text{Transfer Pusat+Provinsi+Pinjaman}} \times 100\%$$

Tingkat kemadirian daerah pengelolaan keuangan dapat diketahui memanfaatkan indikator seperti berikut ini.

Tabel 3. Kriteria Rasio Kemandirian Daerah

Persentase	Kriteria Kemampuan Keuangan
0% - 25 %	Sanagat Rendah
>25% - 50%	Rendah
>50% - 75%	Sedang
>75% - 100%	Tinggi

Sumber : Keputusan Menteri Dalam Negeri No. 690.900.327 tahun 1996
(Harahap & Nasution, 2019)

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

Rasio Efektivitas

Tabel 4. Efektivitas Pengelolaan Keuangan Kota Bandung TA 2020-2023

Tahun Anggaran	Realisasi PAD (Rp)	Target PAD (Rp)	Persentase (%)
2020	2,063,783,773,736	2,264,814,094,039	91.12%
2021	2,195,971,884,100	2,409,804,328,188	91.13%
2022	2,759,323,397,868	3,042,796,596,349	90.68%

2023	2,939,884,900,333	3,148,029,792,322	93.39%
Rata-Rata	2,489,740,989,009	2,716,361,202,725	91.58%

Sumber : Data diolah

Dalam rentang waktu tahun anggaran 2020 hingga 2023, manajerial (PAD) Pemkot Bandung menunjukkan tingkat efektivitas yang stabil dan cukup baik. Rata-rata rasio efektivitas PAD dalam periode ini mencapai 91,58%, yang menurut klasifikasi termasuk dalam kategori efektif (rentang 90–100%). Ini menandakan bahwa kinerja pemerintah dalam merealisasikan target PAD cukup optimal.

Capaian ini merefleksikan adanya konsistensi dalam upaya peningkatan kinerja fiskal daerah, khususnya dalam perencanaan target dan realisasi penerimaan PAD. Meskipun belum mencapai tingkat sangat efektif (>100%), keberhasilan menjaga efektivitas PAD di atas 90% selama empat tahun berturut-turut patut diapresiasi. Keberhasilan ini juga menunjukkan kemampuan Pemerintah Kota Bandung dalam mempertahankan kestabilan fiskal melalui strategi pengelolaan keuangan yang terbilang stabil.

Rasio Efisiensi

Tabel 5. Efisiensi Pengelolaan Keuangan Kota Bandung TA 2020-2023

Tahun Anggaran	Realisasi Belanja (Rp)	Realisasi Penerimaan (Rp)	Persentase (%)
2020	5,374,019,732,054	5,643,962,288,458	95.22%
2021	5,646,807,120,638	5,838,244,931,395	96.72%
2022	6,446,027,711,554	6,415,745,415,059	100.47%
2023	6,718,755,096,778	6,905,926,043,905	97.29%
Rata-Rata	6,046,402,415,256	6,200,969,669,704	97.42%

Sumber : Data diolah

Berdasarkan data efisiensi pengelolaan keuangan Pemerintah Kota Bandung selama periode tahun anggaran 2020 hingga 2023, dapat disimpulkan bahwa pengelolaan anggaran masih tergolong tak efisien, beserta rerata rasio efisiensi senilai 97,42%. Capaian menggambarkan meskipun Pemkot Bandung berhasil merealisasikan penerimaan dalam jumlah yang besar, namun pengendalian terhadap belanja daerah belum optimal. Efisiensi yang tinggi justru mencerminkan bahwa belanja hampir menyamai bahkan melampaui pendapatan, yang bertolak belakang dengan prinsip efisiensi anggaran. Karenannya, kedepannya wajib ada evaluasi terhadap program-program belanja, terutama yang menyerap anggaran besar namun belum

tentu memberikan hasil yang sepadan. Penguatan prinsip *value for money* perlu menjadi fokus utama agar belanja pemerintah benar-benar menghasilkan manfaat maksimal bagi masyarakat.

Rasio Kemandirian Daerah

Tabel 6. Kemandirian Daerah Pengelolaan Keuangan Kota Bandung TA 2020-2023

Tahun Anggaran	Pendapatan Asli Daerah (Rp)	Bantuan Pemerintah Pusat/Provinsi (Rp)	Persentase (%)
2020	2,063,783,773,736	3,352,264,380,653	61.56%
2021	2,195,971,884,100	3,417,764,482,463	64.25%
2022	2,759,323,397,868	3,652,222,017,191	75.55%
2023	2,939,884,900,333	3,965,852,034,572	74.13%
Rata-Rata	2,489,740,989,009	3,597,025,728,720	68.87%

Sumber : Data diolah

Berdasarkan data kemandirian keuangan Pemerintah Kota Bandung tahun anggaran 2020–2023, diketahui bahwa rata-rata rasio kemandirian berada pada angka 68,87%, yang tergolong dalam kategori sedang. Artinya, implikasi (PAD) atas jumlah pendapatan daerah telah signifikan, namun tetap belum sepenuhnya mandiri atas pertolongan lembaga pusat maupun provinsi. Di 2022 dan 2023, rasio ini bahkan menyentuh angka di atas 74%, menunjukkan adanya peningkatan kapasitas fiskal dan perbaikan dalam pengelolaan pendapatan daerah.

Meskipun belum mencapai kategori tinggi, rasio yang mendekati 70% menunjukkan arah yang positif. Dengan perencanaan strategis yang matang dan penguatan sektor-sektor ekonomi unggulan daerah, Kota Bandung memiliki peluang besar untuk mencapai tingkat kemandirian keuangan yang lebih tinggi. Fokus pada digitalisasi pelayanan publik, efisiensi belanja, dan perluasan basis pajak menjadi langkah penting dalam memperkuat ketahanan fiskal jangka panjang.

5. KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Rasio Efektifitas

Selama tahun anggaran 2020 hingga 2023, efektivitas pengelolaan keuangan Kota Bandung tergolong baik. Realisasi PAD secara konsisten mencapai target dan masuk kategori efektif, bahkan saat COVID-19. Menggambarkan perencanaan yang realistis dan strategi pemungutan

yang optimal. Namun, efektivitas ini belum mencerminkan tingkat kemandirian fiskal karena kontribusi PAD terhadap total pendapatan masih terbatas.

Rasio Efisiensi

Pengelolaan anggaran daerah masih menunjukkan tingkat efisiensi yang rendah. Meskipun penerimaan daerah besar, belanja pemerintah cenderung tinggi dan nyaris menghabiskan seluruh pendapatan. Rasio efisiensi yang mendekati atau melebihi ambang batas menunjukkan kurang optimalnya pengendalian belanja dan lemahnya ruang fiskal, sehingga perlu adanya perbaikan dalam perencanaan dan pelaksanaan anggaran.

Rasio Kemandirian Daerah

Kemandirian fiskal Kota Bandung ada tren kenaikan tiap tahunnya, namun tetap ada di kategori sedang. Meskipun PAD meningkat dan dikelola secara efektif, kontribusinya terhadap keseluruhan pendapatan belum dominan. Menggambarkan Kota Bandung tetap ketergantungan atas dana transfer pusat serta provinsi, sehingga perlu terus mendorong peningkatan PAD agar dapat mencapai kemandirian fiskal yang ideal.

Saran

Rasio Efektivitas

Untuk meningkatkan efektivitas PAD, pemerintah dapat:

- a. Memperluas program pemberdayaan UMKM melalui pelatihan, digitalisasi, dan akses pasar. Pajak dari usaha kecil serta retribusi pasar bisa ditingkatkan dengan pendekatan yang lebih partisipatif.
- b. Mengembangkan sektor pariwisata dan industri kreatif melalui promosi, revitalisasi destinasi wisata, dan event tahunan agar menjadi sumber PAD tambahan.

Rasio Efisiensi

Untuk mengoptimalkan efisiensi anggaran, pemerintah perlu:

- a. Melakukan evaluasi menyeluruh terhadap belanja operasional, terutama belanja pegawai dan belanja barang.
- b. Menerapkan sistem anggaran berbasis kinerja agar belanja terukur dari *output* dan *outcome*.
- c. Mengendalikan belanja kesehatan pasca-pandemi dengan memastikan efisiensi dalam pengadaan, distribusi, dan pembayaran tenaga kesehatan.

Rasio Kemandirian

Guna memperkuat kemandirian fiskal daerah, disarankan:

- a. Memperluas layanan retribusi, mengembangkan BUMD, dan menciptakan inovasi pendapatan dari sektor digital, teknologi, serta ekonomi hijau.
- b. Menjadikan pariwisata sebagai salah satu sumber PAD utama dengan membangun destinasi tematik, memperbaiki infrastruktur, dan memperluas kemitraan dengan sektor swasta.

DAFTAR PUSTAKA

- Agil, A. E., Ramayani Yusuf², & Rohimat Nur Hasan. (2023). Pengaruh Har Ga Terhadap Keputusan Pembelian Pada Restoran Shukaku Di Kota Garut. *Jurnal Manajemen Dan Pemasaran (JUMPER)*, 2(1), 109–119. <https://doi.org/10.51771/jumper.v2i1.558>
- Amanda, R., Arief, K., & Ishak, J. F. (2021). Analisis Laporan Realisasi Anggaran Untuk Mengukur Kinerja Keuangan Pada Pemerintah Kota Bandung. *Indonesian Accounting Research Journal*, 2(1), 52–62.
- Dian Anita, & Octavianidori, I. (2024). Analisis Rasio Keuangan Untuk Mengukur Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah (Studi Kasus Pemerintah Provinsi Jawa Barat). *JEMSI (Jurnal Ekonomi, Manajemen, Dan Akuntansi)*, 10(3), 1790–1802. <https://doi.org/10.35870/jemsi.v10i3.2448>
- Divianto, F. (2017). Pengaruh Rasio Keuangan Terhadap Pertumbuhan Laba Perusahaan Perbankan. *Eksis: Jurnal Riset Ekonomi Dan Bisnis*, 12(2), 109–125. <https://doi.org/10.26533/eksis.v12i2.108>
- Harahap, J. P. R., & Nasution, M. D. (2019). Analisis Kemandirian dan Efektivitas Keuangan Pada Kinerja Pemerintah Kota Medan. *Jurnal Administrasi Bisnis*, 8(1), 9–14. <https://doi.org/10.14710/jab.v8i1.22406>
- Heriyanto, W. F. (2024). Analisis Kinerja Keuangan Pengelolaan Dana Desa Berdasarkan Rasio Efektivitas, Rasio Efisiensi, Rasio Desa Tegalluar Kecamatan Bojongsoang. *Akrual Jurnal Akuntansi*, 9(204), 2231–2239.
- Hidaya, M. F., & Hasbiullah. (2023). Analisis Efisiensi Keuangan Daerah Dan Efektivitas Pendapatan Asli Daerah Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Di Provinsi Sulawesi Selatan. *Journal of Regional Economics*, 4(2), 56–69.

- Irnawati. (2023). *Analisis Kinerja Keuangan Daerah Pada Kota Makasar*. 4, 403–416.
http://etd.repository.ugm.ac.id/home/detail_pencarian/113738
- Safrudin, R., Zulfamanna, Kustati, M., & Sepriyanti, N. (2023). Penelitian Kualitatif. *Journal Of Social Science Research*, 3(2), 1–15.
- Yusri; Hasrina. (2019). Analisa Rasio Efektivitas, Rasio Efisiensi dan Rasio Kemandirian Keuangan Daerah Terhadap Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah (APBD). *Jurnal Humaniora: Jurnal Ilmu Sosial, Ekonomi Dan ...*, 3(2), 155–162.
<http://103.52.61.43/index.php/humaniora/article/view/345>
- Yusri, C. D. H. (2019). Analisa Rasio Efektivitas, Rasio Efisiensi dan Rasio Kemandirian Keuangan Daerah Terhadap Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). *Jurnal Humaniora: Jurnal Ilmu Sosial, Ekonomi Dan ...*, 3(2), 155–162.